



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Laporan ALCO Regional

s.d 31 Maret 2022

Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Utara





Ringkasan Eksekutif



Realisasi APBN Regional

s.d. 31 Maret 2022 total pendapatan Rp6,46 T dan total belanja Rp12,11 T sehingga menghasilkan **Defisit regional sebesar Rp5,65 T**



Deviasi realisasi Penerimaan atas proyeksi

Total deviasi sisi Pendapatan sebesar Rp3,97 T dari pagu, disumbang oleh:
DJP (pajak) : Rp2,78 T
DJCB (bea cukai) : Rp1,02 T
PNBP/Hibah : Rp0,16 T



Deviasi realisasi Pengeluaran atas proyeksi

Total deviasi sisi Belanja sebesar Rp1,03 M disumbang oleh:
Belanja K/L : Rp0,57 M
TKDD: Rp0,47 M



Realisasi I-Account APBD

s.d. 31 Maret 2022 mencapai Pendapatan Rp4,79 T, Belanja Rp2,85 M dan Pembiayaan Daerah Rp177,33 M dan akumulasi SiLPA Rp2,116,23M



Kontribusi TKDD pada APBD

Realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD s.d 31 Maret 2022 sebesar Rp3.185,53 miliar (8,13% dari pagu) dengan kontribusi sebesar 66,48% dari total Realisasi APBD



Perkembangan Ekonomi Regional

PDB Regional pada tw IV 2021 **Terkontraksi sebesar 3,81%** dibandingkan triwulan sebelumnya.
Februari 2022, Inflasi Sumatera Utara **sebesar 0,71% (m-to-m)**.
Bea Keluar tumbuh didorong kinerja dari pertumbuhan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya sejak akhir 2020.



Strategic Issues

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, belum terdapat data realisasi PEN. Pembangunan Bandara di Mandailing Natal, Pembangunan Jalan akses KSPN Danau Toba dan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan dapat mempercepat laju perekonomian di Sumut



Policy Response

Terhadap kebijakan peningkatan tarif perpajakan, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif serta assessment dampak kenaikan Tarif perpajakan tersebut terhadap tingkat konsumsi masyarakat

STRATEGIC DASHBOARD ALCo REGIONAL s.d 31 MARET 2022

COVID UNCERTAINTY

Dinamika Covid terus berlanjut namun lebih terkendali

Covid Updates :

PPKM Level 1 Berlanjut, Situasi Membaik



- Kasus Covid-19 di Prov. Sumatra Utara terus membaik akibat kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah
- Jumlah vaksinasi dosis 1 : 10,73 juta
- Jumlah vaksinasi dosis 2 : 8,87 juta
- Jumlah vaksinasi dosis 3 : 1,38 juta

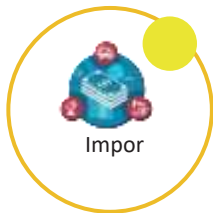
Neraca Perdagangan:

Kinerja Neraca perdagangan pada regional Sumatra Utara semakin baik (m-to-m)



Ekspor

Ekspor ↓

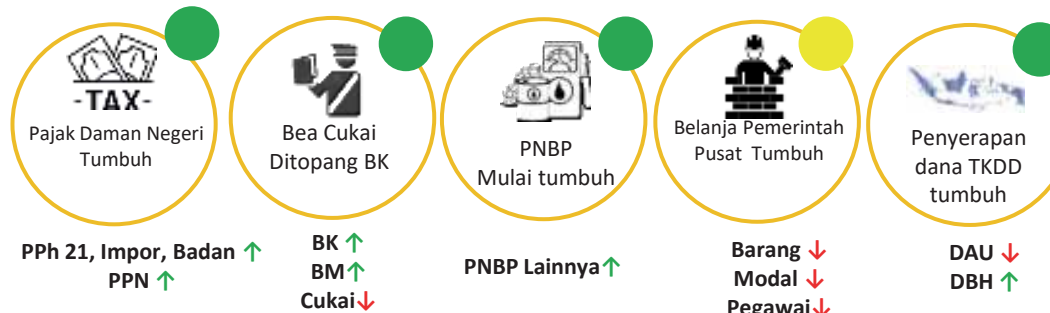


Impor

Impor ↓

Inflow kembali meningkat meski tetap volatile

Fiskal : Percepatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah didukung perbaikan kinerja pajak dan posisi kas yang likuid menjadi stimulus akselerasi PDB hingga Maret 2022



Sektor Riil : Pemulihan konsumsi RT dan aktivitas korporasi membaik seiring dengan terkendalinya Covid-19.



Risiko-Risiko

1. Risiko Pandemi Covid dan program vaksinasi
 - Peningkatan tren kasus Covid 19
 - Adanya varian baru
 - Kecepatan vaksinasi
2. Risiko Penerimaan Perpajakan
3. Risiko Realisasi Percepatan Belanja
4. Risiko lainnya.

Rekomendasi ALCo Regional

● Normal
 ● Perlu Perhatian
 ● Perlu Perhatian Lebih Lanjut
 ● Perlu Penanganan Khusus



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

APBN





Realisasi I-Account Wilayah Sumatera Utara s.d. 31 Maret 2022

URAIAN	2021			2022			Growth (%)
	Pagu	realisasi Q1	% Real	APBN-P	REALISASI Q1	% Real	
A. Pendapatan dan Hibah	28.653,74	4.116,64	14,37%	27.616,60	6.464,93	23,41%	57,04%
I. Penerimaan Dalam Negeri	28.653,74	4.116,64	14,37%	27.616,60	6.464,93	23,41%	57,04%
1. Penerimaan Perpajakan	25.219,45	2.799,86	11,10%	23.610,22	4.443,68	18,82%	58,71%
2. Kepabeanan & Cukai	1.768,39	932,19	52,71%	2.123,09	1.575,50	74,21%	69,01%
II. PNBP	1.665,89	384,60	23,09%	1.883,29	445,75	23,67%	15,90%
B. Belanja Negara	61.235,92	11.490,98	18,77%	59.844,37	11.295,26	18,87%	-1,70%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.074,06	3.279,91	15,56%	19.997,63	2.910,10	14,55%	-11,28%
1. Belanja K/L	21.074,06	3.279,91	15,56%	19.997,63	2.910,10	14,55%	-11,28%
2. Belanja Non K/L	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	40.161,86	8.211,07	20,44%	39.846,75	8.385,16	21,04%	2,12%
A. Transfer ke Daerah	35.636,57	8.008,63	22,47%	35.449,96	8.219,74	23,19%	2,64%
B. Dana Desa	4.525,29	202,44	4,47%	4.396,78	165,42	3,76%	-18,28%
C. Keseimbangan Primer	0	0	0	0	0	0	0
D. Surplus/Defisit Anggaran	-32.582,18	-7.374,34	22,63%	-32.227,78	-4.830,33	14,99%	34,50%
E. Pembiayaan Anggaran	0	0	0	0	0	0	0
SiLPA/(SiKPA)	-32.582,18	-7.374,34	22,63%	-32.227,78	-4.830,33	14,99%	34,50%

(miliar rupiah)

Kinerja APBN s.d. Maret 2022 (YoY)

- Pendapatan Wilayah Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar Rp2.348,29 miliar (57,04%) dibandingkan tahun 2021.

Kinerja Belanja APBN s.d. Maret 2022 (YoY)

- Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp195,72 miliar (64,49%) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Maret 2022 telah terealisasi sebesar 13,14% dari pagu.

Surplus/Defisit (Cash flow)

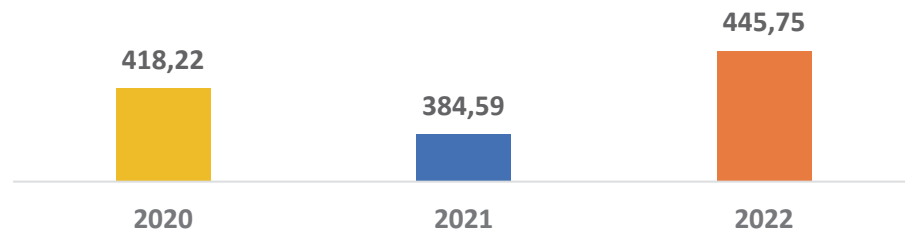
- Defisit APBN di Sumut sebesar Rp2.544,01 miliar lebih baik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni defisit sebesar Rp7.374,34 miliar, atau tumbuh positif sebesar 34,50%.

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan SIMTRADA (diolah)



KINERJA PNBP s.d 31 MARET 2022

Realisasi PNBP s.d Maret 2022 Rp445,75 miliar



5 jenis pendapatan PNBP tertinggi per Maret 2022

No.	Akun	Pendapatan
1.	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	111.26
2.	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	43.73
3.	Pendapatan Biaya Pendidikan	39.94
4.	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	25.59
5.	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	22.90

Realisasi PNBP sampai dengan Maret 2022 telah terealisasi 23,67% dari pagu. Realisasi tersebut naik 15,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan PNBP per K/L



MENDIKNAS

112,63 M



POLISI

100,73 M



MENHAN

68,86 M



MENHUB

36,51 M



MENKES

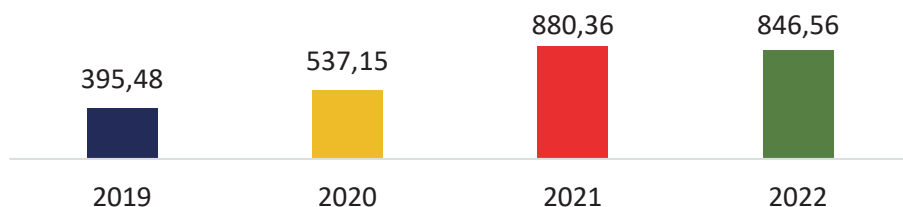
30,51 M

Sumber : aplikasi OM-SPAN

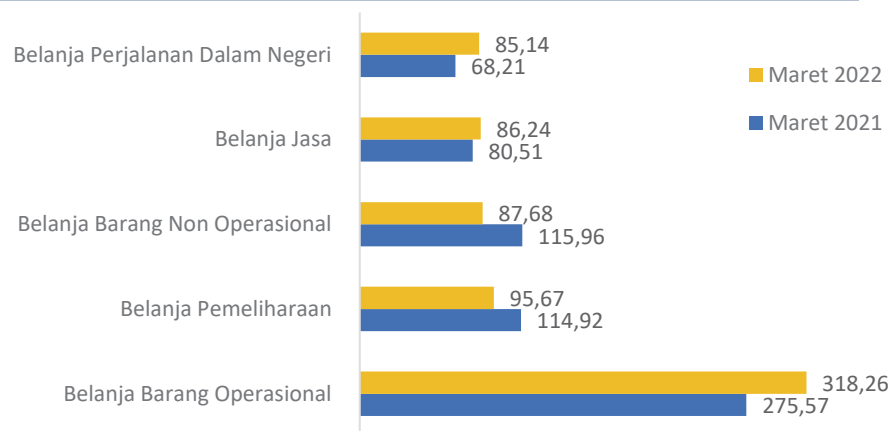


CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 31 MARET 2022

Realisasi Belanja Barang s.d Maret 2022 Rp846,56 miliar



Realisasi Belanja Barang Terbesar per Akun



Realisasi belanja barang Maret tahun 2022 turun 3,84% yang didominasi oleh Belanja Operasional sebesar Rp318,26 miliar (tumbuh 15,49% dibandingkan tahun sebelumnya)

Kinerja Belanja Barang K/L



POLRI

▲ 7,91%(yoy)

173,84 M

2021 : 161,10 M



MENHAN

▲ 62,19%(yoy)

109,08 M

2021 : 67,25 M



PUPR

▼ 32,25%(yoy)

107,31 M

2021 : 158,39 M



MENKUMHAM

▲ 35,19%(yoy)

90,17M

2021 : 66,70 M



AGAMA

▼ 10,26%(yoy)

66,87M

2021 : 74,51M

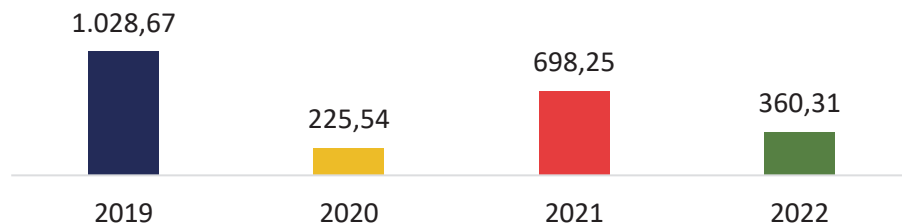
- Penurunan realisasi belanja barang antara lain karena pendapatan pada beberapa satker BLU masih rendah pada triwulan I 2022 sehingga mempengaruhi realisasi belanja barang
- Pihak ke-3 belum mengajukan tagihan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sumber : aplikasi OM-SPAN

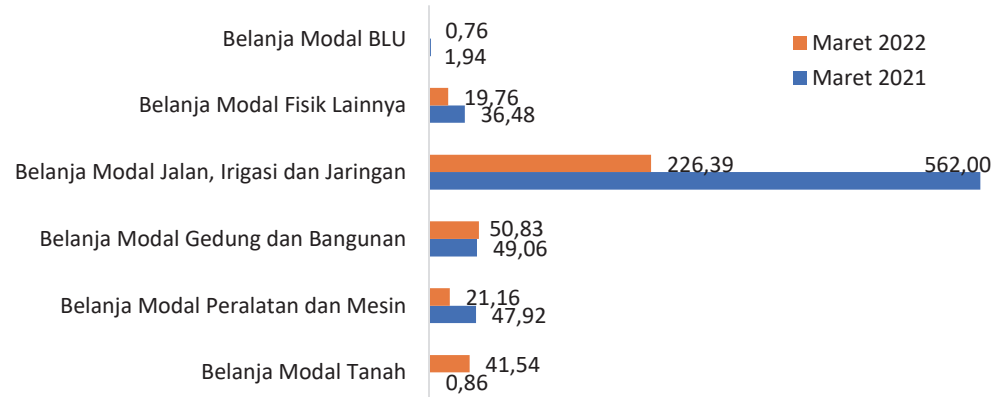


CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 31 MARET 2022

Realisasi Belanja Modal Rp360,31 miliar



Realisasi Belanja modal Terbesar per Akun



Realisasi belanja modal Maret tahun 2022 turun 48,40%. Peningkatan tinggi terjadi pada Belanja Modal tanah sebesar Rp40,68 miliar (4.742,07%). Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan turun 59,72%.

Kinerja Belanja Modal K/L



KEMENHUB

▲ 778,44%(yoy)

Rp150,61 M

2021 : Rp17,14 M



PUPR

▼ 76,42%(yoy)

Rp139,40 M

2021 : Rp591,26 M



MENHAN

▲ 12,68%(yoy)

Rp31,27 M

2021 : Rp35,81 M



MENAG

▲ 22,09%(yoy)

Rp19,26 M

2021 : Rp15,78 M



KEMENTAN

▲ 172,74%(yoy)

Rp4,16 M

2021 : Rp1,53M

- Untuk satker Dekon/TP belum ditetapkan pejabat perbendaharaan
- Proses lelang dan penandatanganan kontrak baru dilaksanakan setelah triwulan I dan sebagian belanja modal masih dalam proses lelang. Keterlambatan tersebut antara lain disebabkan adanya perubahan desain pekerjaan konstruksi, pelaksanaan lelang dilaksanakan secara terpusat.
- Pihak ke-3 belum mengajukan tagihan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sumber : aplikasi OM-SPAN



CAPAIAN PENGELUARAN s.d. 31 MARET 2022

Realisasi TKDD s.d 31 MARET 2022

1. Belanja yang bersumber dari TKDD telah terealisasi sebesar 22,70% atau senilai 9,04 triliun.
2. Penyaluran dana transfer untuk DAK Fisik belum terealisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;



Sumber : aplikasi OM-SPAN dan SIMTRADA (diolah)



Rincian Realisasi I-Account Wilayah Sumatera Utara s.d. 31 Maret 2022

(miliar rupiah)

URAIAN	2021			2022			Growth (%)
	Pagu	Real Q1	%Real	Pagu	Real Q1	% Real	
A. Pendapatan dan Hibah	28.653,74	4.116,64	14,37%	27.616,60	6.464,93	23,41%	57,04%
I. Penerimaan Dalam Negeri	28.653,74	4.116,64	14,37%	27.616,60	6.464,93	23,41%	57,04%
1. Penerimaan Perpajakan	26.987,84	3.732,04	13,83%	25.733,31	6.019,18	23,39%	61,28%
a. Pajak Dalam Negeri	26.177,18	3.062,00	11,70%	24.410,77	4.613,20	18,90%	50,66%
i. Pajak Penghasilan	13.263,57	2.203,63	16,61%	12.104,79	3.231,45	26,70%	46,64%
- Migas	0	0,05	0	0	0,00	0	-99,74%
- Non Migas	13.263,57	2.203,58	16,61%	12.104,79	3.231,45	26,70%	46,65%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	11.055,95	500,81	4,53%	10.461,70	1.142,76	10,92%	128,18%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	520,99	27,20	5,22%	729,31	3,90	0,53%	-85,66%
v. Cukai	957,73	262,14	27,37%	800,55	169,52	21,18%	-35,33%
vi. Pajak Lainnya	378,94	68,22	18,00%	314,43	65,57	20,85%	-3,89%
b. Pajak Perdagangan Internasional	810,67	670,04	82,65%	1.322,54	1.405,98	106,31%	109,83%
i. Bea Masuk	747,54	209,62	28,04%	783,05	215,35	27,50%	2,74%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	63,13	460,43	729,34%	539,48	1.190,63	220,70%	158,59%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.665,89	384,60	23,09%	1.883,29	445,75	23,67%	15,90%
c. PNBP Lainnya	635,54	226,62	35,66%	800,11	305,16	38,14%	34,66%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	1.030,35	157,98	15,33%	1.083,19	140,58	12,98%	-11,01%
II. Hibah	0	0	0	0	0	0	0,00%
B. Belanja Negara	61.235,92	11.490,98	18,77%	59.844,37	12.110,96	20,24%	5,40%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.074,06	3.279,91	15,56%	19.997,63	2.910,10	14,55%	-11,28%
1. Belanja Pegawai	8.982,86	1.699,69	18,92%	9.180,48	1.698,23	18,50%	-0,09%
2. Belanja Barang	7.283,23	880,36	12,09%	6.977,08	846,56	12,13%	-3,84%
3. Belanja Modal	4.769,34	698,25	14,64%	3.793,20	360,31	9,50%	-48,40%
4. Pembayaran Kewajiban Utang	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Subsidi	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Bantuan Sosial	38,64	1,61	4,16%	46,87	4,99	10,65%	210,96%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	40.161,86	8.211,07	20,44%	39.846,75	9.200,86	23,09%	12,05%
A. Transfer ke Daerah	35.636,57	8.008,63	22,47%	35.449,96	9.035,44	25,49%	12,82%
a. Dana Perimbangan	35.190,02	8.008,63	22,76%	35.318,46	9.029,05	25,56%	12,74%
i. Dana Transfer Umum	24.264,66	7.183,51	29,60%	24.566,37	7.208,86	29,34%	0,35%
- Dana Bagi Hasil	1.577,23	778,45	49,36%	1.874,44	70,20	3,74%	-90,98%
- Dana Alokasi Umum	22.687,43	6.405,06	28,23%	22.691,93	7.138,66	31,46%	11,45%
ii. Dana Transfer Khusus	10.925,36	825,12	7,55%	10.752,09	1.820,19	16,93%	120,60%
- Dana Alokasi Khusus Fisik	2.975,40	0,00	0,00%	3.059,24	0,00	0,00%	0,00%
- Dana Alokasi Khusus NonFisik	7.949,96	825,12	10,38%	7.692,85	1.820,19	23,66%	120,60%
b. Dana Insentif Daerah	446,54	0,00	0,00%	131,51	6,39	4,86%	0,00%
c. Dana Otsus dan Keistimewaan	0	0	0	0	0	0	0,00%
B. Dana Desa	4.525,29	202,44	4,47%	4.396,78	165,42	3,76%	-18,28%
C. Keseimbangan Primer	0	0	0	0	0	0	0,00%
D. Surplus/Defisit Anggaran	-32.582,18	-7.374,34	22,63%	-32.227,78	-5.646,03	17,52%	-23,44%
E. Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0,00%

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan SIMTRADA (diolah)





PROYEKSI DAN CAPAIAN PENERIMAAN

Proyeksi Penerimaan pada bulan Maret *overstated* sebesar **Rp3,80 triliun** [realisasi Pajak lebih tinggi Rp2,78 triliun, realisasi Bea Cukai lebih tinggi Rp1,02 triliun, dan realisasi PNPB dan Hibah lebih rendah Rp0,16 triliun]. Pada bulan April 2022, penerimaan pajak diproyeksikan Rp2.325,34 M, Bea Cukai Rp742,28 M dan PNPB/Hibah Rp170,25 M.

**Dalam ribuan rupiah*

No	Bulan	Pajak				Bea Cukai				PNBP dan Hibah				
		Real	Proy	Real	Dev	Real	Proy	Real	Dev	Real	Real	Proy	Real	Dev
		2021	2022	2022		2021	2022	2022		2020	2021	2022	2022	
1	Januari	880,431,647	2,048,358,721	2,229,520,000	8.84%	243,758,599	181,080,582	533,435,765	194.58%	111,166,655	66,172,490	360.650.306	118.687.534	-67,1%
2	Februari	1,202,299,106	1,545,174,923	2,092,266,132	35.41%	249,624,119	379,479,246	445,892,888	13.62%	109,854,051	68,084,397	322.796.149	72.290.523	-77,6%
3	Maret	1,216,868,308	1,662,938,760	4.443.677.358	167,22%	438,804,336	553,674,391	1.575.503.848	184,55%	197,292,032	250,340,293	91.716.292	254.767.712	177,8%
4	April	2,204,997,472	2,325,335,483			584,379,170	742,283,308			203,019,718	116,135,119	170.249.544		
5	Mei	1,456,680,031	1,712,785,617			462,599,682	901,397,664			76,797,801	117,926,862	212.435.272		
6	Juni	1,107,214,209	1,707,944,467			447,208,320	1,078,609,214			207,996,415	217,917,826	194.544.003		
7	Juli	947,807,843	1,769,833,730			523,680,903	1,230,210,274			87,628,227	168,945,836	205.278.764		
8	Agustus	1,380,956,483	1,837,736,571			414,281,256	1,403,973,424			118,707,252	133,185,345	202.265.498		
9	September	1,540,840,657	1,987,810,601			605,099,860	1,568,509,572			195,609,769	229,048,198	205.655.423		
10	Oktober	1,471,215,218	1,958,411,663			578,467,548	1,731,632,530			211,777,254	175,350,096	206.220.410		
11	November	2,388,141,832	2,279,967,477			613,132,956	1,914,936,757			132,724,506	205,537,069	208.103.701		
12	Desember	1,890,887,171	2,773,919,528			761,723,876	2,123,089,101			184,748,768	411,134,303	209.422.005		
TOTAL		23,610,217,541	5,256,450,000	4,321,786,132		5,922,760,625	13,808,876,063	979,328,653		1,837,322,448	2,159,777,834	417,114,876,845	254,958,690	

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan metode ARIMA Autoregressive (diolah)



PROYEKSI DAN CAPAIAN PENGELUARAN

Proyeksi Belanja pada bulan Maret 2022 *overstated* sebesar **Rp0,58 triliun** [realisasi Belanja K/L lebih tinggi Rp0,57 triliun dan realisasi TKDD lebih tinggi Rp0,47 triliun. Pada bulan April 2022, Belanja K/L diproyeksikan Rp1,81 T dan TKDD Rp2,87 T.

**Dalam ribuan rupiah*

No	Bulan	Belanja K/L				TKDD			
		Real 2021	Proy 2022	Real 2022	Dev	Real 2021	Proy 2022	Real 2022	Dev
1	Januari	554.217.394	1.345.208.432	565.144.043	-57,99%	2.625.700.584	3.283.371.988	2.934.942.313	-10,61%
2	Februari	1.297.934.878	1.497.089.523	1.342.690.544	-10,31%	2.755.433.996	3.032.337.479	2.250.508.641	-25,78%
3	Maret	2.581.572.364	1.607.045.013	2.172.178.939	35,17%	3.656.191.878	2.542.222.486	3.010.914.279	18,44%
4	April	2.206.691.530	1.809.785.286			2.999.178.301	2.868.965.814		
5	Mei	3.528.973.531	2.047.757.053			4.322.137.095	3.008.429.430		
6	Juni	2.420.519.847	1.983.764.645			3.999.156.675	3.060.230.202		
7	Juli	2.191.053.003	2.071.754.206			1.712.264.530	3.139.923.697		
8	Agustus	2.294.996.830	2.083.752.782			3.173.930.167	3.207.663.168		
9	September	2.580.610.931	2.133.746.851			3.618.233.211	3.283.371.988		
10	Oktober	4.062.780.763	2.163.743.292			5.490.375.662	3.355.096.133		
11	November	3.052.910.887	2.203.738.547			3.602.786.987	3.426.820.278		
12	Desember	4.736.300.686	2.239.734.277			3.326.757.292	3.498.544.424		
TOTAL		31.508.562.644	23.187.119.906	4.080.013.526		41.282.146.378	34.423.605.099	8.196.365.233	

Sumber : aplikasi OM-SPAN dan metode ARIMA Autoregressive (diolah)





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

APBD DAN KINERJA TKDD





Kinerja APBD Regional Provinsi Sumatera Utara Periode s.d Maret 2022

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
A. Pendapatan Daerah	57.225,41 M	4.791,84 M	8.37
PAD	14.911,98 M	1.564,50 M	10.49
Pajak Daerah	11.337,70 M	1.473,99 M	13.00
Retribusi Daerah	752,87 M	18,46 M	2.45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	708,09 M	0,00 M	0.00
Lain-Lain PAD yang Sah	2.113,31 M	72,05 M	3.41
TKDD	39.183,14 M	3.185,53 M	8.13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	39.183,14 M	3.185,53 M	8.13
Pendapatan Lainnya	3.130,29 M	41,81 M	1.34
Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.572,55 M	27,01 M	1.05
Pendapatan Hibah	166,62 M	12,37 M	7.43
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	391,12 M	2,43 M	0.62
B. Belanja Daerah	59.502,33 M	2.852,94 M	4.79
Belanja Pegawai	21.766,31 M	1.713,65 M	7.87
Belanja Barang Jasa	14.936,26 M	335,45 M	2.25
Belanja Modal	9.303,59 M	105,60 M	1.14
Belanja Lainnya	13.496,18 M	698,24 M	5.17
Belanja Bunga	44,29 M	0,38 M	0.87
Belanja Subsidi	2,69 M	0,00 M	0.00
Belanja Hibah	3.117,25 M	104,29 M	3.35
Belanja Bantuan Sosial	253,60 M	0,03 M	0.01
Belanja Tidak Terduga	655,63 M	4,66 M	0.71
Belanja Bagi Hasil	2.745,72 M	477,46 M	17.39
Belanja Bantuan Keuangan	6.676,99 M	111,42 M	1.67
Surplus/(Defisit)	-2.276,92 M	1.938,90 M	-85.15
Pembiayaan Daerah	2.744,67 M	177,33 M	6.46
Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.076,73 M	181,33 M	5.89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.126,03 M	181,33 M	8.53
Penerimaan Pinjaman Daerah	935,50 M	0,00 M	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	15,00 M	0,00 M	0.00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,20 M	0,00 M	0.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	332,06 M	4,00 M	1.20
Penyertaan Modal Daerah	224,19 M	4,00 M	1.78
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	101,52 M	0,00 M	0.00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,35 M	0,00 M	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	2.744,67 M	177,33 M	6.46
SILPA	467,75 M	2.116,23 M	452,43

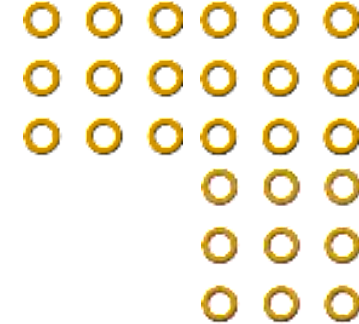
(miliar rupiah)

JENIS TKDD	PAGU	REALISASI	%
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	1.874,44	70,20	3,74%
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	22.691,93	7.138,66	31,46%
3. DAK Fisik	3.059,24	0,00	0,00%
4. DAK Non Fisik	7.692,85	1.004,50	13,06%
5. DID	131,51	6,39	4,86%
6. Dana Desa	4.396,78	165,42	3,76%
JUMLAH	39.846,75	8.385,16	21,04%

1. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara s.d 31 Maret 2022 sebesar Rp4.791,84 miliar didominasi oleh komponen Pajak Daerah sebesar Rp1.473,99 miliar dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.185,53 miliar.
2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumatera Utara s.d 31 Maret 2022 sebesar Rp2.852,94 miliar didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp1.713,65 miliar.
3. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Sumatera Utara s.d 31 Maret 2022 sebesar Rp3.185,53 atau 66,48% dari total Realisasi APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sumatera Utara
4. Per 31 Maret 2022, alokasi dana TKDD sebesar Rp39,84 triliun telah realisasi sebesar Rp8.39 triliun (21,04%).
5. Dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi penurunan pagu TKDD sebesar Rp1,97 triliun dan terjadi penurunan realisasi sebesar Rp0,19 triliun.

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id dan aplikasi OM-SPAN

Paparan ALCO Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara Maret 2022



Kinerja APBD Regional Provinsi Sumatera Utara Periode s.d Maret 2022

No	Daerah	PAGU DAK Fisik	Realisasi
1	PROVINSI SUMATERA UTARA	330,88	o
2	KAB. ASAHAN	95,70	o
3	KAB. DAIRI	172,32	o
4	KAB. DELI SERDANG	89,45	o
5	KAB. KARO	92,10	o
6	KAB. LABUHANBATU	51,32	o
7	KAB. LANGKAT	81,44	o
8	KAB. MANDAILING NATAL	96,81	o
9	KAB. NIAS	117,58	o
10	KAB. SIMALUNGUN	207,96	o
11	KAB. TAPANULI SELATAN	56,20	o
12	KAB. TAPANULI TENGAH	110,99	o
13	KAB. TAPANULI UTARA	69,16	o
14	KAB. TOBA	95,64	o
15	KOTA BINJAI	40,42	o
16	KOTA MEDAN	34,67	o
17	KOTA PEMATANG SIANTAR	50,10	o
18	KOTA SIBOLGA	33,00	o
19	KOTA TANJUNG BALAI	31,31	o
20	KOTA TEBING TINGGI	50,03	o
21	KOTA PADANGSIDIMPUAN	22,36	o
22	KAB. PAKPAK BHARAT	66,29	o
23	KAB. NIAS SELATAN	125,39	o
24	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	131,13	o
25	KAB. SERDANG BEDAGAI	143,96	o
26	KAB. SAMOSIR	83,11	o
27	KAB. BATU BARA	67,51	o
28	KAB. PADANG LAWAS	57,73	o
29	KAB. PADANG LAWAS UTARA	69,99	o
30	KAB. LABUHANBATU SELATAN	65,19	o
31	KAB. LABUHANBATU UTARA	44,78	o
32	KAB. NIAS UTARA	76,66	o
33	KAB. NIAS BARAT	154,99	o
34	KOTA GUNUNGSITOLI	43,08	o

(miliar rupiah)

REKOMENDASI:

- Mendorong Kepala Daerah untuk memberikan instruksi percepatan realisasi TKDD, khususnya penyaluran DAK Fisik, DID dan Dana Desa.
- Mendorong Pemda untuk meningkatkan koordinasi internal antar instansi yang terlibat dalam penyaluran TKDD.
- Menyediakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi untuk mengelola penyaluran TKDD.
- Memperbanyak frekuensi Bimtek dan sosialisasi bagi operator keuangan Pemda terkait penyaluran TKDD
- Menginformasikan TKDD kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi.

Sumber : Aplikasi OM-SPAN





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL





PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA

1

Maret 2022



**NILAI TUKAR
PETANI (NTP)**

128,65
(Maret 2022)

**NILAI TUKAR USAHA
PETANI (NTUP)**

128,07
(Maret 2022)



3

Maret 2022



**NILAI TUKAR
NELAYAN**

110,19
(Maret 2022)



5

Februari 2022



EKSPOR

USD885,40 juta



IMPOR

USD473,4 Juta

2

Triwulan IV 2021



**PERTUMBUHAN
PDRB**

3,81%
(yoy)



4

Maret 2022



INFLASI

0,71
(maret)

3,26 (yoy)

1,54

(jan-maret 2022)

- Kota Sibolga inflasi 0,93%;
- Kota Medan inflasi 0,68%;

Rekomendasi:

Perlunya koordinasi antar kabupaten/kota serta provinsi dalam menciptakan aglomerasi industri dalam rangka meningkatkan perekonomian Sumatera Utara

Sumber: BPS, BI, Disperindag, Diolah, 2022



PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA UTARA

6
September 2021



LAJU
PERTUMBUHAN
PENDUDUK

1,23%

8
September 2021



PERSentase
PENDUDUK MISKIN

8,49%

10
Agustus 2021



TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA

6,33%

7
Desember 2021



INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA

72

9
September 2021



GINI RATIO

0,313

11
ANGKA
PARTISIPASI
SEKOLAH



USIA 7-12:	↑ 99,32%
USIA 13-15:	↑ 96,99%
USIA 16-18:	↓ 78,66%
USIA 19-24:	↑ 27,05%





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Current Issues & Strategic Issues di **Regional Provinsi Sumatera Utara**





Current Issues di Regional Sumatera Utara

No.	Current Issues	Dampak Negatif yang mungkin timbul	Rekomendasi
1.	Terkait UU HPP: • NIK menjadi NPWP • Tarif PPh Badan menjadi 22% • Tarif PPh OP mengalami perubahan untuk penghasilan yang diatas 5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 35% • Tarif PPN menjadi 11% • Penambahan Objek PPN • Penerapan Pajak Karbon • Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	1. Pemulihan ekonomi menjadi melambat 2. Penerimaan negara menjadi kurang optimal	Perlu sosialisasi yang massif agar UU HPP dapat dipahami oleh seluruh Wajib Pajak
2.	Diharapkan seiring dengan kebijakan penghapusan Rapid Test Antigen untuk seluruh moda transportasi, diharapkan terjadi peningkatan jumlah wisatawan manca negara, sehingga perekonomian sektor pariwisata di provinsi Sumatera Utara dapat semakin bergerak	Tidak dapat terpantaunya persebaran Covid-19 di daerah	Akselerasi vaksinasi keberbagai daerah untuk mempercepat herd immunity





Strategic Issues di Regional Sumatera Utara





**Update Penanganan Covid di Regional Sumatera Utara
s.d 31 Maret 2022**

KASUS POSITIF KUMULATIF



Sumut : 154.527
Nasional : 5.735.055

1.581
KASUS
AKTIF

Turun **2,41%**
dibanding bulan
sebelumnya

TOTAL SEMBUH

149,722

Meningkat **35.389**
dibanding bulan
Feb 2022

VAKSINASI SUMUT



Dosis 1 : 10.726.650 (93,93%)
Dosis 2 : 8.868.849 (77,66%)
Dosis 3 : 1.384.311 (12,12%)





Policy Response





Policy Response

No.	Permasalahan Fiskal	Dampak Negatif yang mungkin timbul	Rekomendasi
1.	Kenaikan PPH Badan, PPN dan PPN OP, serta perubahan peruran perpajakan yang berlaku tanggal 1 April 2022, seperti: - PMK- 42/PMK.010/2022 - PMK- 71/PMK.03/2022 - PMK- 70/PMK.03/2022 - PMK-65/PMK.03/2022 - Dll PMK lainnya	Ditengah pemulihan perekonomian akibat dampak Pandemi Covid-19, kenaikan tarif perpajakan dan kenaikan harga komoditas dapat memberatkan masyarakat dan berdampak pada dunia usaha serta konsumsi masyarakat.	• Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif serta assessment dampak kenaikan Tarif perpajakan tersebut terhadap tingkat konsumsi masyarakat.
2	Anggaran Belanja yang telah ditetapkan untuk TA. 2022 pada tahun 2021, dirancang dengan menggunakan PPN 10%. Dengan adanya kebijakan peningkatan tarif PPN 11% akan berpengaruh kepada DIPA masing-masing Satker.	Peningkatan tarif PPN 11% dapat membuat kekurangan anggaran belanja K/L sebagai efek dari kenaikan tarif PPN tersebut.	Perlu dilakukan revisi DIPA atau penambahan anggaran belanja K/L.

Sumber : northsumatrainvest.id





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

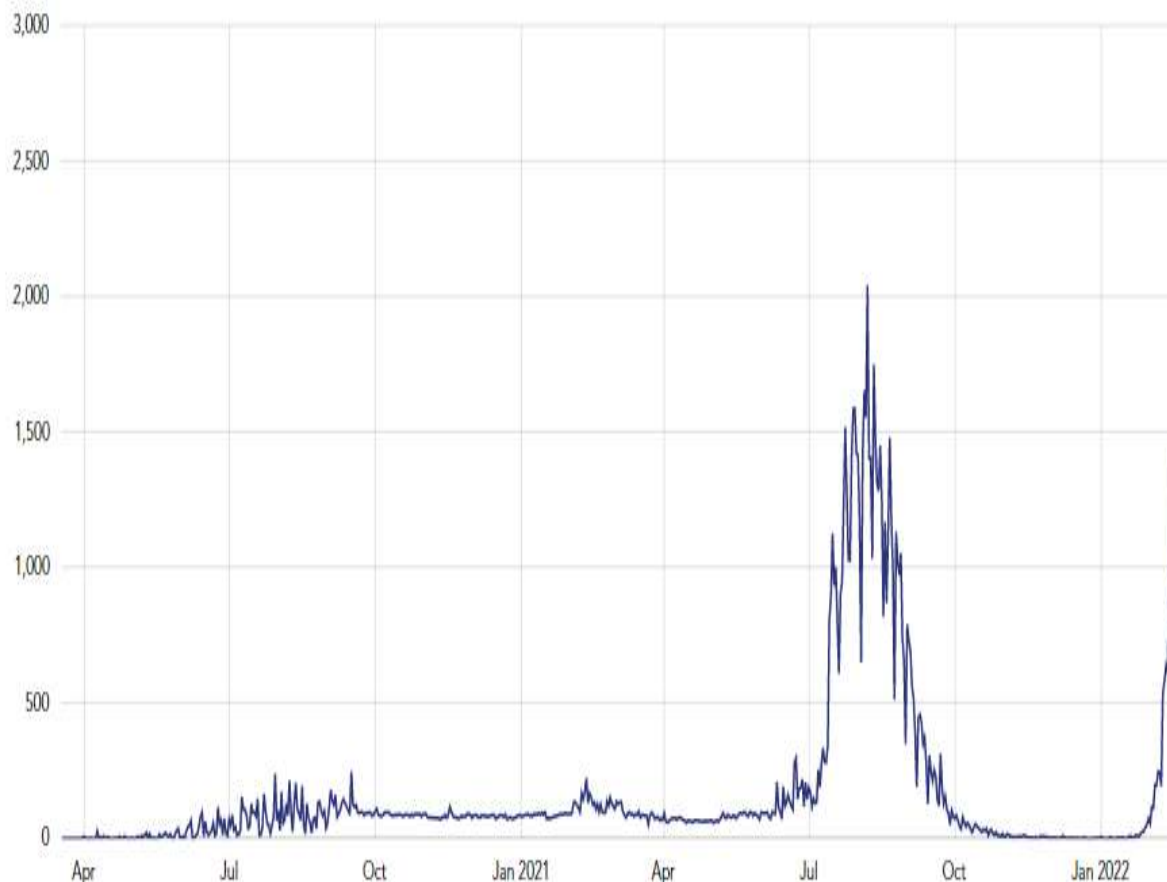


TERIMA KASIH



Volatilitas Ekonomi Global dan Perkembangan Covid-19 yang Berdampak pada Ekonomi Indonesia dan Sumatera Utara

1 Tren peningkatan kasus Covid-19 Sumut dan kemunculan varian Omicron



2 Pengetatan kebijakan moneter AS (*tapering-off*) akan dipercepat

Potensi dampaknya ke ekonomi Indonesia:

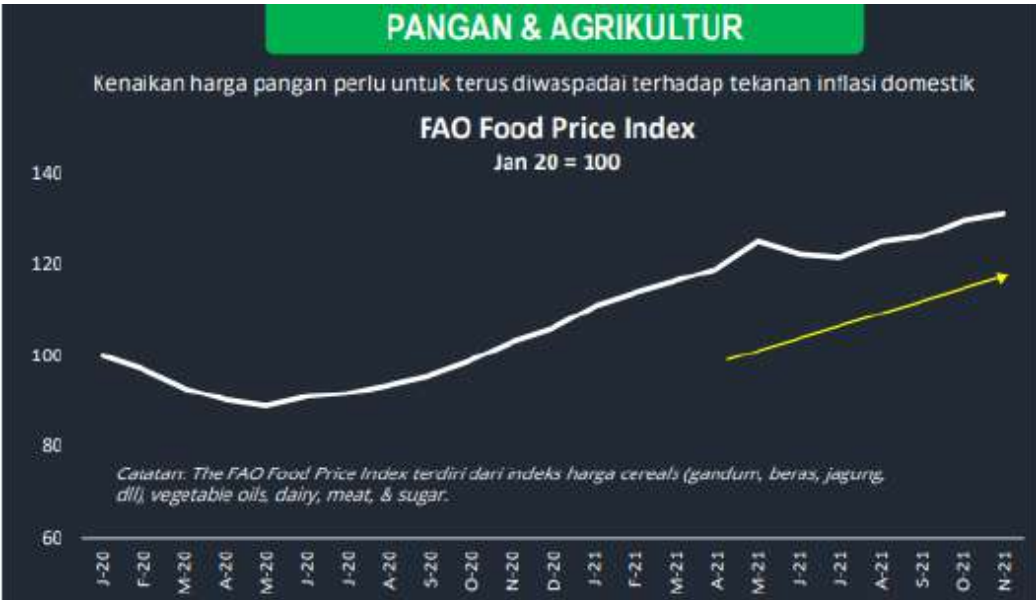
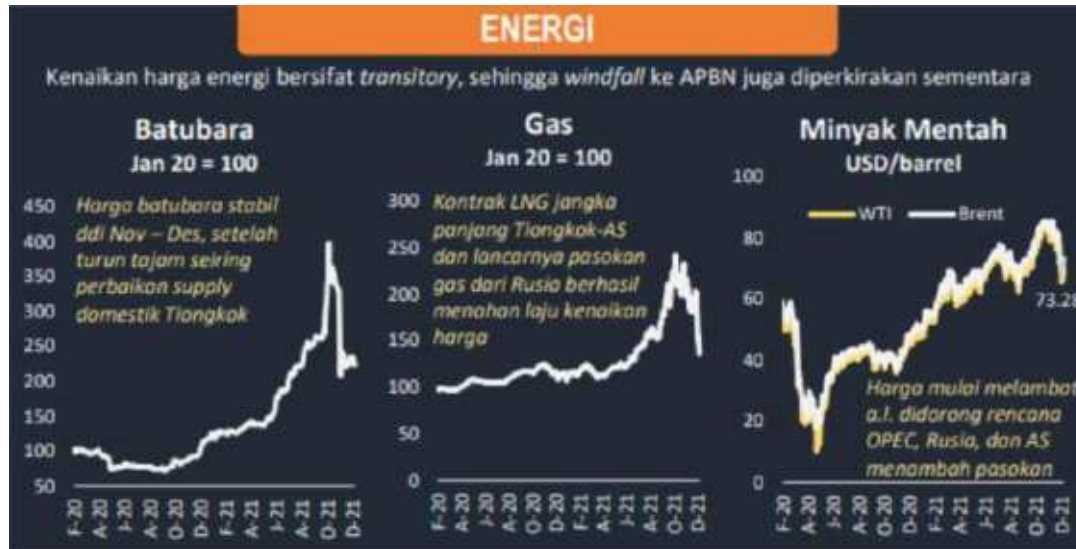
- a **Net capital outflow** → depresiasi nilai tukar rupiah → harga bahan baku impor naik → harga barang jadi naik (inflasi) → berdampak pada konsumsi dalam negeri
- b **Tingkat suku bunga naik**
 - kredit investasi menurun → ekspansi bisnis tertahan
 - kredit konsumsi menurun → konsumsi menurun

3 Perlambatan ekonomi Tiongkok

Ekspor Nonmigas ke Tiongkok mulai menunjukkan penurunan (ekspor November turun US\$515,1 juta; penurunan tertinggi dibandingkan negara tujuan ekspor lainnya)

TANTANGAN 2022

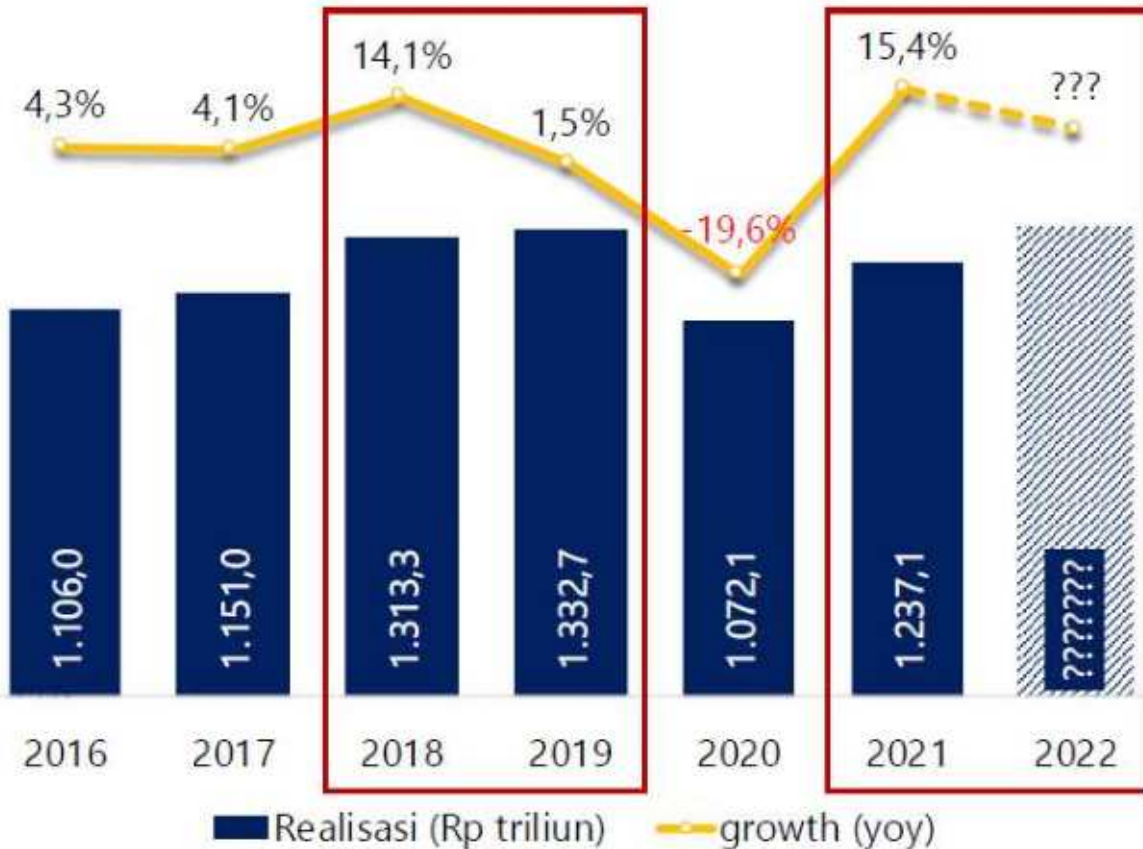
Harga Komoditas dalam Tren Menurun



TANTANGAN 2022

Basis Penerimaan Pajak Tahun 2021 yang Tinggi

Perkembangan Penerimaan Pajak



- Tingginya penerimaan pajak pada tahun 2021 bahkan belum dapat diprediksi pada pertengahan tahun 2021

Rp1.176,3 T

LapSem I 2021

Rp1.142,5 T

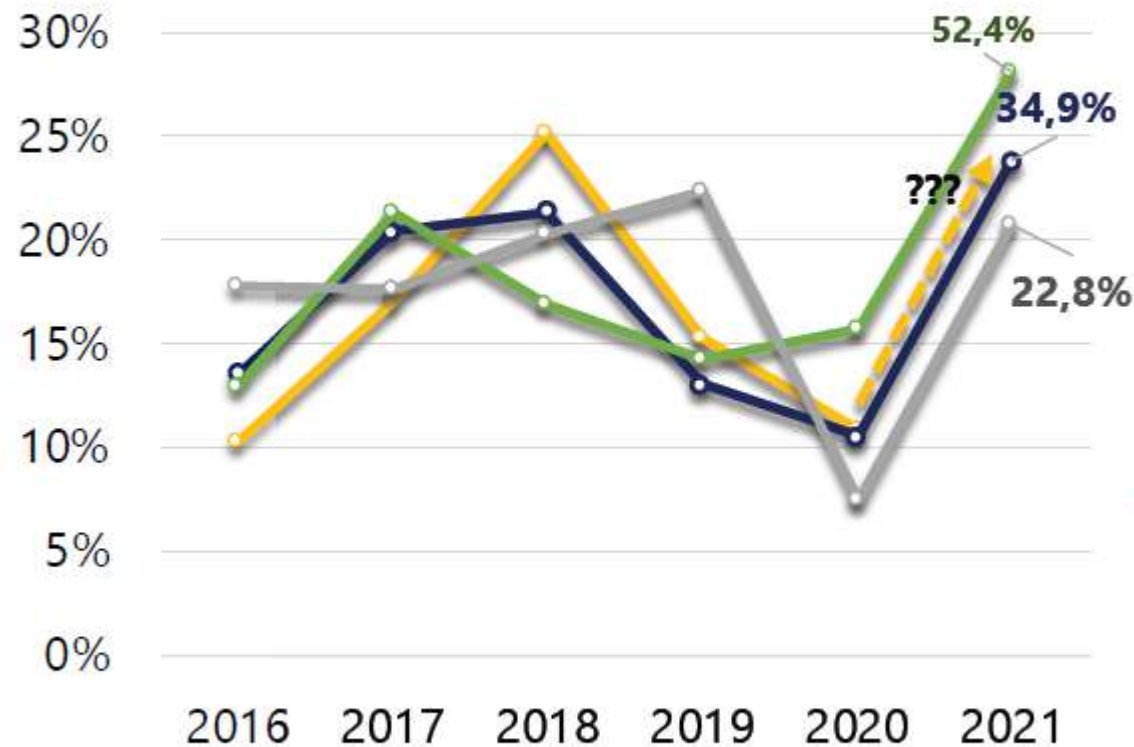
RAPBN 2022

Rp1.237,1 T

Outlook Des

- Penerimaan pajak tahun 2021 didorong oleh perbaikan ekonomi dan peningkatan harga komoditas. Kedua hal ini mendorong dilakukannya dinamisasi pada sektor-sektor yang tumbuh dengan sangat baik
- Kondisi tahun 2021 mirip dengan tahun 2018 karena pada kedua tahun ini harga komoditas meningkat dan dinamisasi dilakukan cukup masif
- Penerimaan pajak mampu tumbuh 14,1% pada tahun 2018, namun kemudian melambat menjadi sebesar 1,5% pada tahun 2019. Tren perlambatan yang sama berpotensi terjadi pada tahun 2022.

Perkembangan PPN Impor dan Restitusi PPN DN



—○— Restitusi PPN DN t+1 (axis kiri) —○— PPN Impor (axis kanan)
—○— Peny. Ekspor (axis kanan) —○— Peny. DN (axis kanan)

- Peningkatan pertumbuhan impor pada suatu tahun biasanya diikuti oleh peningkatan pertumbuhan restitusi pada tahun berikutnya. Sebelumnya, PPN Impor pernah meningkat 25,1% pada tahun 2018, yang kemudian diikuti oleh peningkatan restitusi PPN DN sebesar 25,0% pada tahun 2019.
- Hingga 20 Desember 2021, PPN Impor naik 34,9% (yoy), yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2016. Hal ini kemungkinan akan diikuti oleh peningkatan restitusi yang cukup besar juga pada tahun 2022.
- Tingginya pertumbuhan impor ini merupakan pendorong kinerja ekspor dan penjualan DN yang tumbuh sangat baik pada tahun 2021.

Catatan:
 Penyerahan Ekspor dan DN berd. SPT Masa PPN Jan-Okt 2021; PPN Impor s.d. 20 Des



NIK menjadi NPWP



Penambahan Objek PPN



Penerapan Pajak Karbon per 1 April 2022, pada PLTU Batubara dengan tarif Rp30.000/tCO₂e atau Rp30.000 per kilogram Co₂ ekuivalen



Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Perubahan Tarif PPH Badan

UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020)		UU HPP	
Tahun Pajak	Tarif	Tahun Pajak	Tarif
Tahun 2020 dan 2021	22%		
Tahun 2022	20%	Tahun 2022 dst.	22%

Perubahan Tarif PPN

UU PPN		UU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d. Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

Perubahan Tarif PPH OP

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp50 juta	5%	0 - Rp60 juta	5%
II	>Rp50 - 250 juta	15%	>Rp60 - 250 juta	15%
III	>Rp250 - 500 juta	25%	>Rp250 - 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp5 miliar	35%

Bagi orang pribadi pengusaha dengan **peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.**

PMK-
42/PMK.010/2022

- Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai PPnBM, dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan, Dan Pengembalian PPnBM

PMK-
71/PMK.03/2022

- PPN untuk jasa Pengiriman Paket, Jasa Biro Perjalanan, Jasa Pengurusan Transportasi, Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Keagamaan
- Tarif sebesar 10%

PMK-
70/PMK.03/2022

- Kriteria Dan/Atau Rincian Makanan Dan Minuman, Jasa Kesenian Dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga Atau Katering, Yang Tidak Dikenai PPN

PMK-
65/PMK.03/2022

- PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
- Sebesar 1.1% dari Harga Jual berlaku pada 1 April 2022
- Sebesar 1,2% dari harga Jual berlaku paling lambat 1 Januari 2025



PMK -
66/PMK.03/2022

- PPN Atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Tarif sebesar 11% berlaku pada 1 April 2022
- Tarif sebesar 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025

PMK-
67/PMK.03/2022

- PPN Atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, Dan Jasa Pialang Reasuransi
- Tarif 11% berlaku 1 April 2022
- Tarif 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025

PMK-
68/PMK.03/2022

- PPN yang terutang atas penyerahan Aset Kripto dipungut, disetor, dan dilaporkan
- Tarif 1% utk Pedagang Fisik Aset Kripto
- Tarif 2% utk yang bukan Pedagang Fisik Aset Kripto

PMK-
69/PMK.03/2022

- PPh dan PPN Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Tarif pemotongan sebesar 15% atau 20%



Rencana Kerja 2022

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I & II

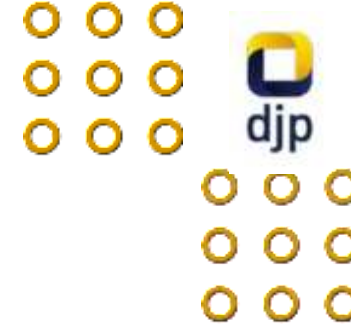


PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)

- **PPS adalah** pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.
- **Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:**
 - a) **Pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan**
 - b) **Pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.**
- **Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022).**

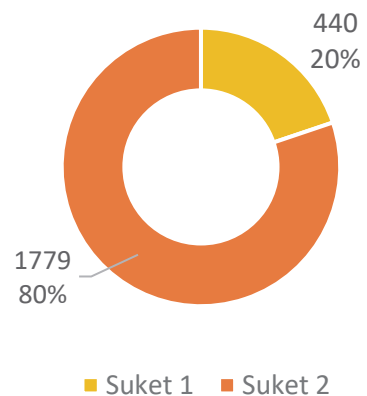
• Tarif PPS

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Tarif PPh Final	11% untuk deklarasi Luar Negeri	18% untuk deklarasi Luar Negeri
	8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri	14% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri
	6% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (<i>renewable energy</i>) di Wilayah NKRI	12% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) / kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) / sektor energi terbarukan (<i>renewable energy</i>) di Wilayah NKRI

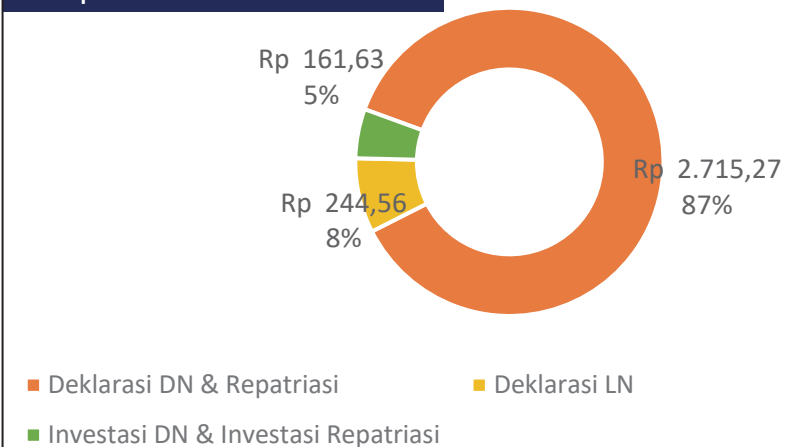


Rekapitulasi PPS 1 Januari s.d. 31 Maret 2022

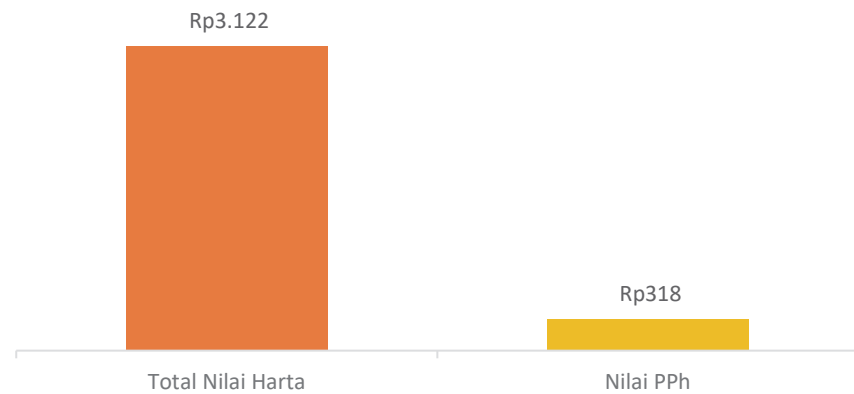
Komposisi Surat Keterangan



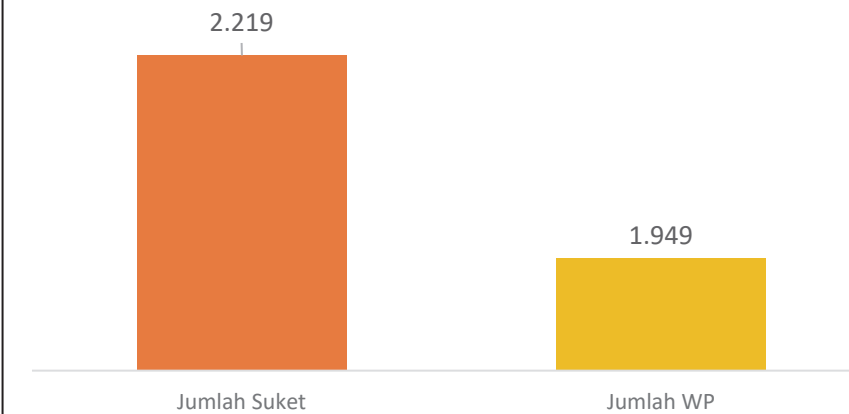
Komposisi Nilai Harta Bersih



Jumlah Nilai Harta Bersih dan Total PPh



Jumlah Suket dan WP



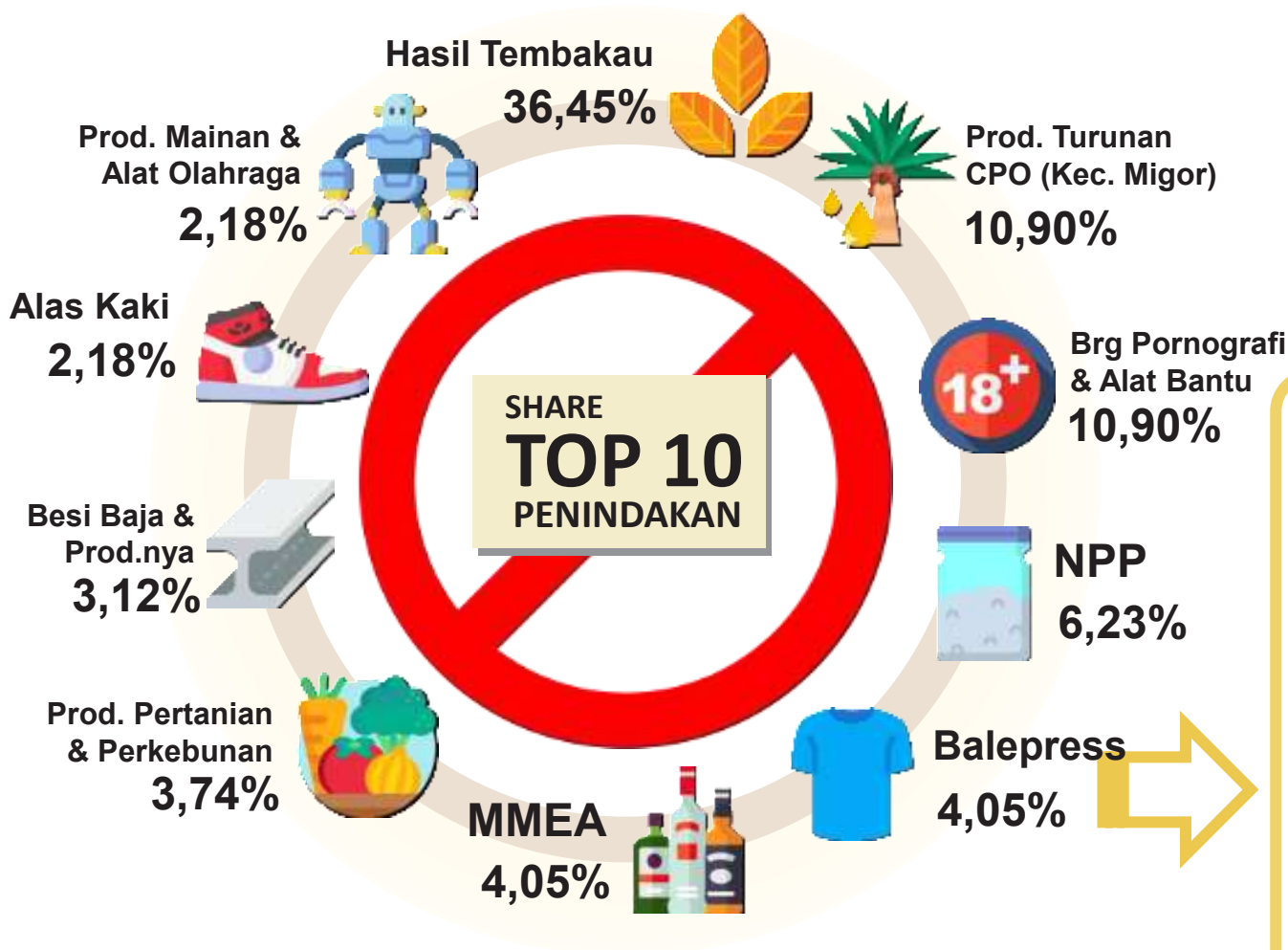
Data dari appportal per 11 April 2022 dalam miliar rupiah

Paparan ALCO Kanwil DJP Provinsi Sumatera Utara Februari 2022

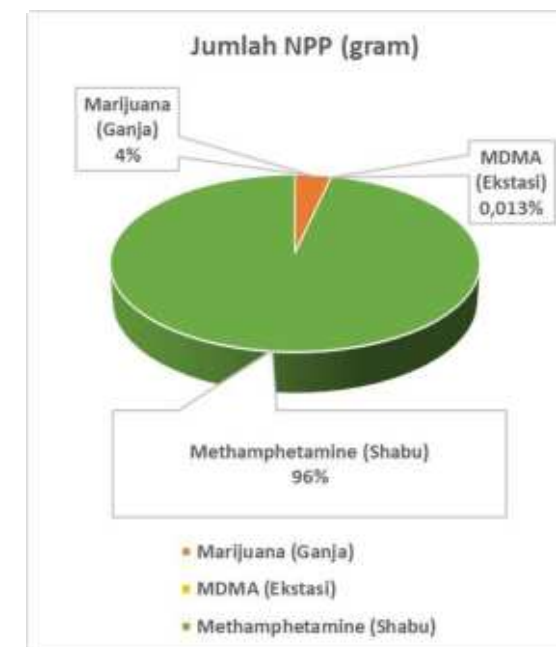
PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

KINERJA PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Juga berperan dalam mendukung penerimaan cukai melalui pemberantasan peredaran rokok ilegal



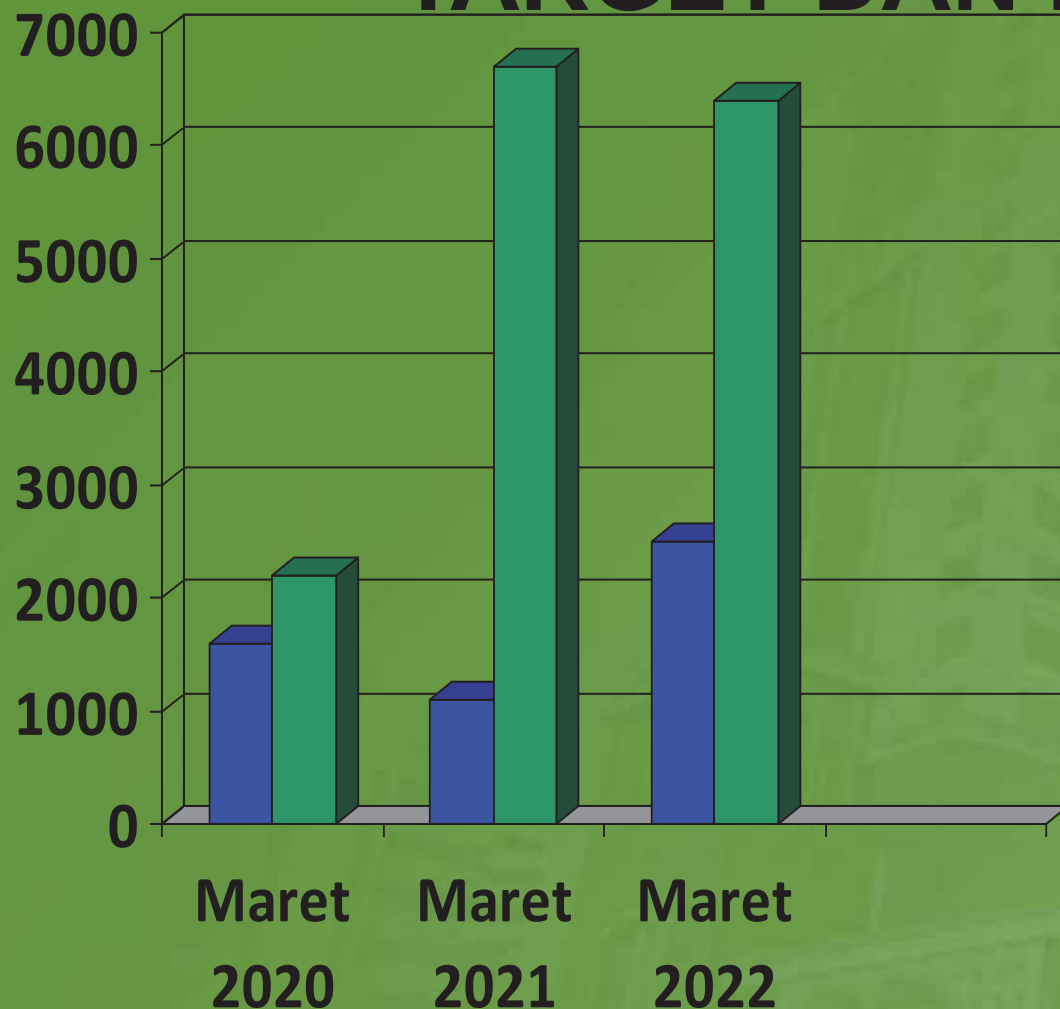
- Penindakan sebagian besar (**36,45%**) dilakukan terhadap Hasil Tembakau (**rokok**);
- Kasus penindakan NPP bulan **Maret mengalami kenaikan** dibandingkan dengan kasus NPP bulan Februari;
- Penindakan terhadap NPP **didominasi jenis *Methamphetamine*** (shabu) yang mencapai 201,8 Kg atau 96% total penindakan selama tahun 2022;



*sumber data : app.penindakan.net



TARGET DAN REALISASI PNBPN BMN



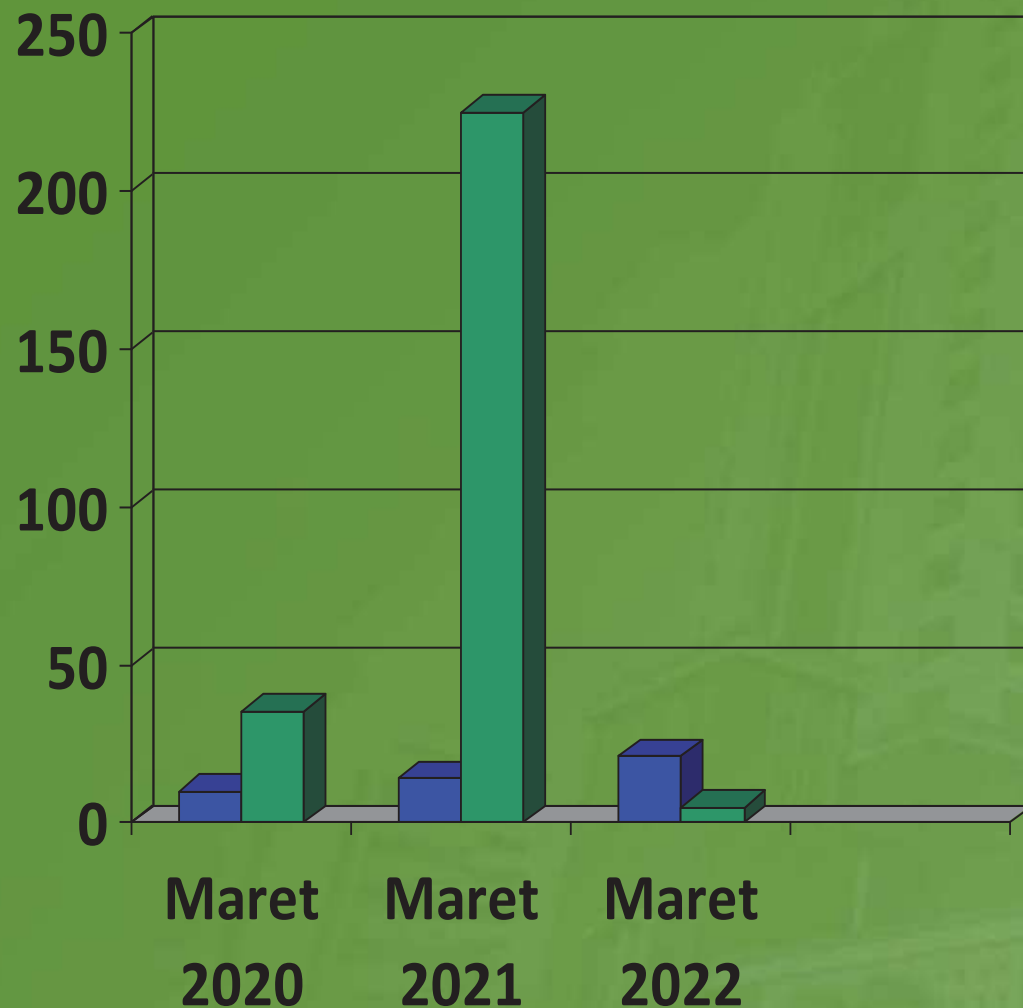
Target Maret 2020 : 1,6 Milyar
Realisasi Maret 2020 : 2,2 Milyar

Target Maret 2021 : 1,1 Milyar
Realisasi Maret 2021 : 6,7 Milyar

Target Maret 2022 : 2,5 Milyar
Realisasi Maret 2022 : 6,4 Milyar



TARGET DAN REALISASI PNBP PIUTANG NEGARA



Target
Realisasi

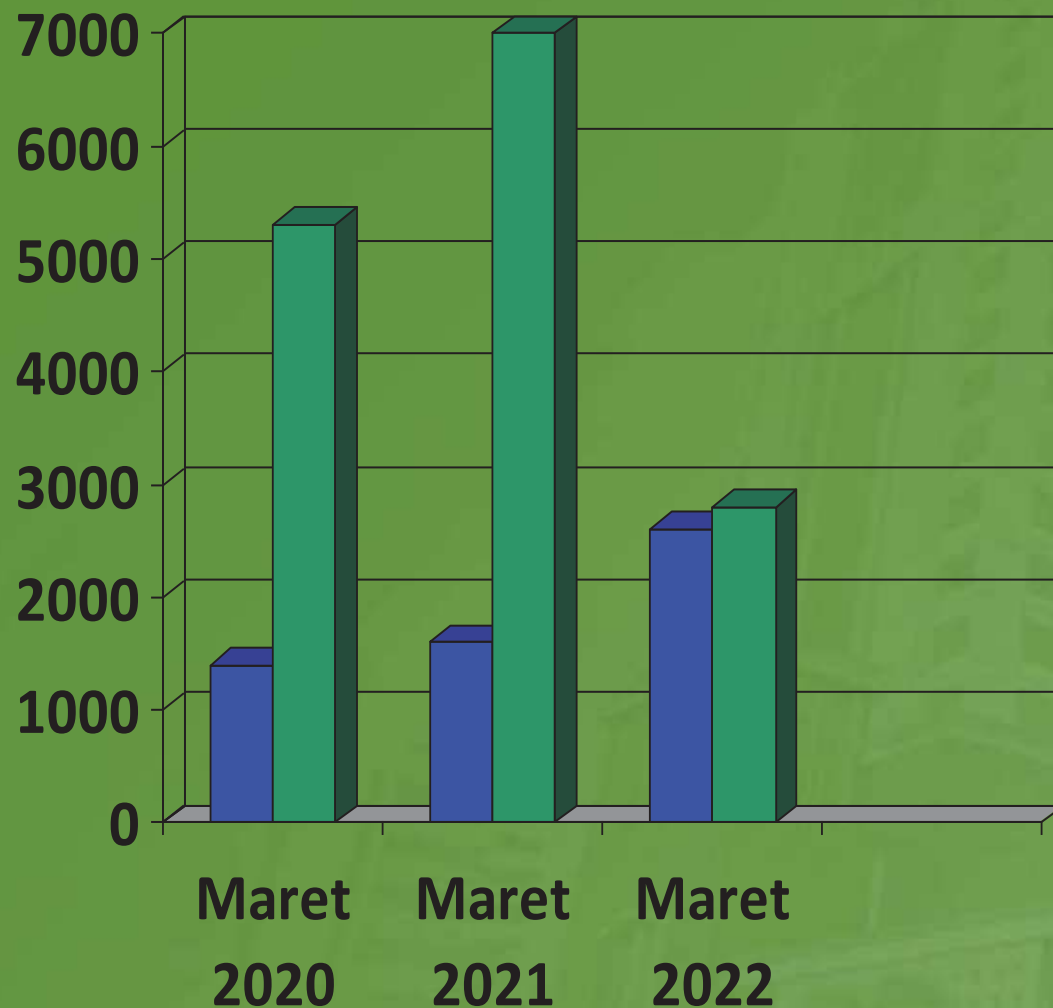
Target Maret 2020 : 10 Juta
Realisasi Maret 2020 : 35 Juta

Target Maret 2021 : 14 Juta
Realisasi Maret 2021 : 225 Juta

Target Maret 2022 : 21 Juta
Realisasi Maret 2022 : 4,7 Juta



TARGET DAN REALISASI PNBP LELANG



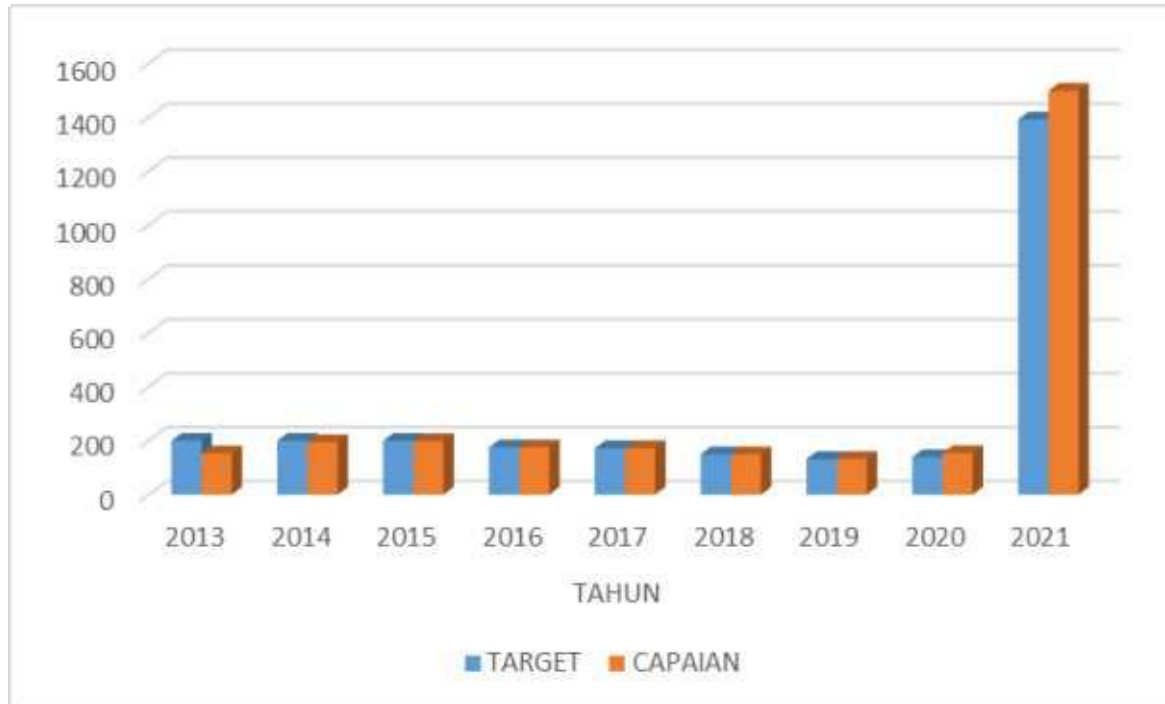
■ Target
■ Realisasi

Target Maret 2020 : 1,4 Milyar
Realisasi Maret 2020 : 5,3 Milyar

Target Maret 2021 : 1,2 Milyar
Realisasi Maret 2021 : 7 Milyar

Target Maret 2022 : 2,6 Milyar
Realisasi Maret 2022 : 2,8 Milyar

ISU STRATEGIS KANWIL DJKN SUMUT : PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH (BMN) TUNTAS TAHUN 2022



KETERANGAN	TAHUN									JUMLAH
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TARGET	200	200	200	175	172	150	132	139	1392	2760
CAPAIAN	153	195	198	175	172	150	132	154	1499	2828

TOTAL TARGET 9 Th : 2760
TOTAL CAPAIAN 9 Th : 2828 (102 %)

Tahun 2022 target :
2082 NUP
(Sertifikasi BMN
TUNTAS TAHUN
2022)

TANTANGAN :

Target 2082 NUP
BMN Tanah,
Sedangkan anggaran
untuk 1833 sertifikat

385 Sertipikat Belum
Sesuai Ketentuan
(BBSK)

